



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial (Survey Pada Perusahaan yang Disurvey HCG Di BEI)**

**SKRIPSI**



**KAUL MHD.ARIE EKA PUTRA  
03.157.031**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



No. Alumni Universitas

KAUL MHD. ARIE EKA PUTRA

No. Alumni Fakultas

**BIODATA**

a). Tempat/Tgl lahir: Bukittinggi, 1 Agustus 1985 b). Nama Orang Tua: Afrimars dan Rahmadia Islami c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No.Bp: 03 157 031 f). Tgl Lulus: 4 Desember 2010 2010 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 2,71 i). Lama Studi: 7 tahun 4 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Ikhlas VII No. 6, Padang.

**PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI MANAJERIAL (SURVEY PADA PERUSAHAAN YANG DISURVEY IICG DI BEI)**

SKRIPSI SI Oleh: **Kaul Mhd. Arie Eka Putra**, Pembimbing: **Dr. Yurniwati, S.E, M.Si, Ak.**

**Abstrak**

*Good Corporate Governance* merupakan tata cara kelola perusahaan yang sehat, dikenalkan Pemerintah dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka *economic recovery* di Indonesia. *Corporate Governance* diterapkan untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. IICG merupakan sebuah lembaga yang mensurvei pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut dikontrol, semakin tinggi peringkat perusahaan dalam survey IICG menunjukkan semakin terkontrolnya perusahaan dan pada akhirnya embuat para investor merasa investasi yg ditanamkan pada perusahaan terjamin dan menghasilkan revenue yang layak bagi investor. Penelitian ini bertujuan, apakah implementasi Corporate Governance berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, Implementasi Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial.

**Keyword** : *Corporate Governance*, IICG dan Pengungkapan Informasi

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 4 Desember 2010, telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	<b>Dra. Sri Daryanti Zen, MBA, Ak</b>	<b>Dra. Sri Dewi Edmawati, S.E, M.Si,Ak</b>	<b>Drs. Edi Herman, MBA, Akt</b>

Mengetahui

Petua Jurusan Akuntansi :

**Dr. H. Yuskar, SE, MA, AK.**  
NIP 131 629 305

\_\_\_\_\_  
**Tanda Tangan**

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : KAUL MHD. ARIE EKA PUTRA  
No. BP : 03 157 031  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : **Pengaruh Implementasi *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial (Survey Pada Perusahaan yang di Survey IICG di BEI)**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 4 Desember 2010 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Desember 2010  
Pembimbing

**Dra. Yurniwati M.Si, Akt**  
NIP. 196404141990022001

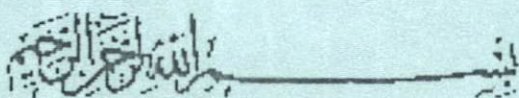
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

**Prof. Dr. H Syafruddin Karimi, SE, MA**  
NIP. 195410091980121001

**Dr. H Yuskar, SE, MA, Akt**  
NIP. 19600911 198603 1 001



Ya Allah  
Atas ridho-Mu selama ini  
Statu perjalanan telah kulalui  
Hari ini langkahku terhenti sejenak  
Namun kusadari .....  
Setitik kebahagiaan ini bukanlah akhir dari segalanya  
Perjalanan yang akan ku tempuh masih teramat panjang  
Bimbinglah aku dan terangkanlah jalanku selalu Ya. Allah  
Amin.....Amin..... Ya Rabbal Alamin

Akal dan belajar seperti ini raga dan jiwa  
Tanpa raga, jiwa hanyalah udara hampa  
Tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa jiwa  
(Kahlil Gibran)

Alhamdulillah.....  
Kupersembahkan karya ini untuk Papa Adrial  
Dan Mama Rahmadia S.Pd  
Sebagai bukti Ananda atas segala do'a dan restumu  
Yang telah mengantarkanku meraih setitik keberhasilan  
Adikku Kartika Susilawati  
Yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya selama ini

Dan kepada seseorang yang sangat kusayangi  
Thank's atas segala dukungan dan perhatiannya  
Dalam menyelesaikan skripsi ini  
Tak lupa buat sobat – sobatku  
Kebersamaan dan pengorbanan yang telah diberikan  
Kan kuingat selamanya  
Semoga kita dapat meraih apa yang dicita-citakan  
Selama ini.....

Ya ..... Allah  
Tetaplah Engkau bersamaku  
Dan limpahkanlah Rahmat-Mu  
Pada mereka yang telah berkorban untukku  
Semoga Engkau selalu menuntun langkah kami  
Ke jalan yang engkau ridhoi  
Amin.....

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

**Padang, Desember 2010**

**Kaul Mhd. Arie Eka Putra**  
**03 157 031**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada seluruh makhluk dan salawat beserta salam untuk nabi Muhammad SAW yang telah menuntun, mengajarkan kebaikan dan membawa manusia dari alam kebodohan sampai kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alhamdulillah dengan nikmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI MANAJERIAL (SURVEY PADA PERUSAHAAN YANG DI SURVEY IICG DI BEI)**". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi UNIVERSITAS ANDALAS Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan penuh penghargaan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Papa Adrial dan Mama Rahmadia Islami S.Pd, terima kasih penulis ucapkan untuk pengorbanan, nasehat, dan dukungan yang tiada hentinya yang diberikan hingga bisa menyelesaikan studi ini.

2. Ibu Dra. Yurniwati, Msi, Akt selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh ketekunan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati MSi, Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi PE-FEUA.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
6. Teman-teman angkatan 2003 terutama Jurusan Akuntansi yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kakak-kakak dan adik-adik **PE-FEUA** yang banyak membantu penulis selama menjalani studi.
8. Karyawan/ti PT. Bank Negar Indonesia 46 Cabang Payakumbuh, yang telah membantu penulis selama proses magang.
9. Kepada seluruh guru dan teman dari SD Negeri 12 Kubang, SLTP Negeri 1 Guguk, dan SMU Negeri 1 Guguk.
10. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada adinda Kartika Susilawati dan Yoni Afrillia akan bantuannya dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan yang akan datang.

Akhir kata penulis mendoakan semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	10
2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	14
2.3 Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
2.4 Faktor Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	22
2.5 Peranan Dewan Komisaris .....	24
2.6 Peranan Komite Audit .....	27
2.7 Peranan Dewan Direksi .....	31
2.8 Pengertian Laporan Keuangan .....	35
2.9 Tujuan Laporan Keuangan .....	37
2.10 Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan .....	38
2.11 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .....	40
2.12 Pengungkapan .....	42
2.13 Tujuan Pengungkapan .....	44
2.14 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	46
2.14.1 Hubungan CG dalam Pengungkapan Informasi .....	46

2.14.2 Profitability and Corporate Governance Disclosure .....	51
2.15 Model Penelitian .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Sampel dan Data Penelitian .....	54
3.2 Spesifikasi Variabel .....	55
3.3 Analisis dan Pengolahan Data .....	57
3.4 Pengujian Hipotesis .....	61
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Analisis Data .....	63
4.1.1 Statistik Deskriptif .....	64
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	65
4.1.2.1 Uji Normalitas .....	65
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas .....	66
4.1.2.3 Uji Autokolerasi .....	67
4.1.2.4 Uji Heterokedasitas .....	68
4.1.3 Analisa Regresi Berganda .....	69
4.1.4 Pengujian Hipotesis .....	70
4.1.4.1 Uji R dan Uji R <sup>2</sup> .....	70
4.1.4.2 Uji F .....	72
4.1.4.3 Uji T .....	73
4.1.5 Pengaruh implementasi <i>CG</i> Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	74
4.1.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	75
4.1.7 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	75
4.1.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	76

4.1.9	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial.....	76
4.1.10	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	77
4.1.11	Pengaruh Regulasi Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial .....	77
4.2	Pembahasan .....	78
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN .....		84
5.1	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran .....	86
5.3	Keterbatasan .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....		88
Lampiran		

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keterangan Jumlah Perusahaan Sample .....	63
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	64
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas .....	67
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi .....	68
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas .....	69
Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Analisa Regresi .....	70
Tabel 4.7 Uji R dan Uji R <sup>2</sup> .....	71
Tabel 4.8 Uji F .....	73
Tabel 4.9 Uji T .....	74
Tabel 4.10 Tabel Kesimpulan Hipotesis .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	66
---------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Definisi laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2002:2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya sistem *regulatory* yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang

lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (re-searchengines.com).

Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik / principal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dilain pihak, principal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan principal untuk memberikan isentif pada agen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko

(Eisenhard, 1989 dalam Khomsiyah, 2003). Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi akses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnyanya. Keinginan principal tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan sebagainya. Produk dari ketiadaakaan harmonisasi antara agen dan principal ini adalah penyebab timbulnya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) (Khomsiyah, 2003).

*Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut.

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002 dalam re-searchengines.com). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley *et.al*, 1996 dalam re-searchengines.com). Chtourou *et al.* (2001) dalam re-searchengines.com juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (re-searchengines.com). Penerapan prinsip *Corporate Governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor.

*Good Corporate Governance* itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Dan aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut

menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*) ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)). Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara struktur *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi telah dilakukan oleh Forker (1992), Ho dan Wong (2000) dan Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003). Pentingnya penelitian mengenai *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, mengingat pentingnya peran *Corporate Governance* dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000; Oman, 2001 dalam Khomsiyah, 2003), meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2002 dalam Khomsiyah, 2003).

Beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bersedia disurvei IICG, karena semakin tinggi tingkat peringkat perusahaan tersebut dalam hasil survey IICG menunjukkan semakin terkontrolnya perusahaan dan pada akhirnya membuat para investor merasa investasi yang ditanamkan pada perusahaan terjamin dan menghasilkan revenue yang layak bagi investor.

Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "**Pengaruh Implementasi *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial (Survey Pada Perusahaan yang Disurvey IICG di BEI)**", dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan antara *Corporate Governance* dengan Pengungkapan Informasi. Selain itu dalam penelitian ini juga ditambahkan satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi yaitu profitabilitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

Apakah *Corporate Governance* mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu :

1. Obyek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI (BEI) dan bersedia disurvey oleh IICG pada tahun 2004–2008 dengan mengambil sampel berdasarkan pemeringkatan 10 perusahaan setiap

tahunnya.

2. Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta yang menerbitkan laporan keuangan selama periode akuntansi 2004 - 2008.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Mengetahui apakah implementasi *Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
- Meneliti kembali variabel-variabel yang ada pada penelitian sebelumnya dengan menambah faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan informasi yaitu profitabilitas.
- Untuk menambah pengetahuan mengenai *Good Corporate Governance*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

- Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia.
- Bagi Investor membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.
- Bagi Perusahaan membantu memberikan gambaran tentang kinerja

perusahaan, dalam hal ini penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dimasa mendatang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### 1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menerangkan teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan, yaitu pengertian *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, faktor penerapan *Good Corporate Governance*, peranan dewan komisaris, peranan komite audit, peranan dewan direksi, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, pengungkapan, tujuan pengungkapan dan tinjauan penelitian terdahulu.

### 3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini akan menerangkan mengenai data-data yang diperlukan meliputi sampel dan data penelitian, spesifikasi variabel, pengolahan data serta pengujian hipotesis.

#### 4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah dilakukan, berupa perhitungan dan hasil akhir yang diperoleh.

#### 5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran bagi pihak yang terkait.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

*Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol.

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* ditahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* diseluruh dunia.

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* (I Nyoman Tjager dalam Deny, 2005) sebagai :

*Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OCED) mendefinisikan *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

*Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) adalah :

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun

melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Selain empat definisi di atas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa, pengertian tentang *Corporate Governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan *stakeholders*. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni ;

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal).
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

## 2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip *Corporate Governance* dan hal ini tidak terbatas bagi pasar-pasar yang sedang tumbuh (*emerging markets*) atau perekonomian yang dalam proses transisi. Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. Perekonomian yang paling maju sekalipun kini tengah membahas, mempertanyakan, dan mengupayakan praktik-praktik “*governance*” yang lebih baik.

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *Corporate Governance* ini, *Organization for Economic Corporation and Development* (OCED) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengolaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.

Prinsip-prinsip OCED menyangkut lima bidang utama: hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya; peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya; pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun

Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Atau secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*) (I Nyoman Tjager, Antonius Alijoyo *et.al*, 2003).

Prinsip-prinsip di atas terkait dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran (*corruption and bribery*), tanggung jawab sosial dan etika korporasi (*corporate social responsibilities and ethics*), tata kelola sektor publik (*public sector governance*) dan reformasi hukum (*regulatory reform*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik *Good Corporate Governance* menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut :

1. *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas- dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN atau keputusan-keputusan yang dapat

merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi atau pengambilalihan perusahaan lain. Biasanya penyakit yang timbul dalam praktik pengelolaan perusahaan berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip *fairness*, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa diperoleh. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan

lembaga peradilan (*litigation abuse*).

## 2. *Disclosure and Transparency* (Transparansi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

## 3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Padahal diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- a. Praktek Audit Internal yang Efektif
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

#### 4. *Responsibilities* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate citizen*. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan / keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanaan dari masyarakat sekitar lingkungan ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

#### 5. *Independency* ( Independensi )

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (I Nyoman Tjager *et.al*, 2003).

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 2.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas

manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003 dalam [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)). Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik *Corporate Governance* dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui '*pool of investors*' diseluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

Survey yang dilakukan oleh lembaga konsultan tingkat dunia seperti McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para institutional investor lebih menaruh kepercayaan terhadap korporasi-korporasi yang memiliki *Corporate Governance* dan memandang *Corporate Governance* sebagai kriteria kualitatif penentu, menyamai kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.

Kalaupun *Good Corporate Governance* bukan obat mujarab untuk keluar

dari krisis. Sistem ini dapat memberi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah sangat berubah dimana independensi, transparansi, profesionalisme dan tanggung jawab sosial menjadi norma dasar (I Nyoman Tjager, Antonius Aliojoyo *et.al*, 2003).

Berbagai analisis menunjukkan bahwa ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis *financial* dan krisis berkepanjangan di negara-negara Asia dengan lemahnya *Corporate Governance*. Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya

mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

#### **2.4 Faktor Penerapan *Good Corporate Governance***

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal.

##### **1. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik / lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG

di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

- e. Syarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

## 2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami

setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, *skill*, kredibilitas dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Yang pasti, jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.

Begitu pula, *independent auditor* yang semestinya tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai aturan dan standar akuntansi, tetapi juga memberi investor maupun kreditor gambaran yang *fair* serta akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal menjalankan perannya.

## 2.5 Peranan Dewan Komisaris

Seharusnya ada definisi yang jelas tentang komisaris "ekstern" atau komisaris "independen". Dalam hubungan ini, FCGI ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org)) mengusulkan agar dipergunakan definisi yang diterima dalam lingkup internasional yaitu komisaris "ekstern" atau "independen". Kriteria Komisaris Independen diambil oleh FCGI dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang

*Outside Directors*. Kriteria untuk *Outside Directors* dalam *One Tier System* tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Komisaris Independen dalam *position paper* FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.

7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. (IndraSurya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org)) meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini. Proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (OECD Principles of Corporate Governance). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

## **2.6 Peranan Komite Audit**

Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite - komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus

perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*Governance*) oleh manajemen. Komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi / Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktik yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota Komisaris Independen.

Walaupun komite-komite tersebut belum merupakan hal yang umum terdapat di berbagai bagian dunia, namun kecenderungan menyebar sejalan dengan perkembangan perusahaan, serta masalah yang lebih kompleks dan lebih luas, Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat seorang komisaris dan menetapkan suatu kebijakan tentang pergantian ketua komite-komite tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komisaris mendapat kesempatan untuk ikut serta sesuai dengan caranya masing-masing dan untuk memperoleh pandangan-pandangan baru.

Dalam *Corporate Governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting, yaitu:

1. Komite Kompensasi / Remunerasi (*Compensation / Remuneration Committee*)

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi / kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

2. Komite Nominasi (*Nomination / Governance Committee*)

Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para

kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.

### 3. Komite Audit (*Audit Committee*)

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org)).

Salah satu dari komite-komite yang telah disebutkan di atas yaitu Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan.

Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu;

### 1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

### 2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

### 3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani

suatu permasalahan.

Tanggungjawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal di mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya.
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

## **2.7 Peranan Dewan Direksi**

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar

pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org)).

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup empat tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, tanggung jawab sosial.

#### 1. Kepengurusan

- a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.

- c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
- d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.
- e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

## 2. Manajemen Risiko

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.
- c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung-jawab terhadap pengendalian risiko.

## 3. Pengendalian Internal

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan

- dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal.
  - c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha.
  - d. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

#### 4. Tanggung Jawab Sosial

- a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org))

Pertanggungjawaban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
3. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.

## **2.8 Pengertian Laporan Keuangan**

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Definisi laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2002:2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Definisi lain mengenai laporan keuangan yaitu penyajian informasi dalam

bentuk yang mudah dipahami dan sebagai dasar utama dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Dasar pembuatan laporan keuangan adalah jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya yang telah diposting ke buku besar ([www.zahiraccounting.com](http://www.zahiraccounting.com)).

Definisi lainnya yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

Adapun laporan keuangan menurut Erich A. Helfert adalah ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)):

Seperangkat laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk periode tertentu, laporan operasi untuk periode tertentu, dan laporan arus dana untuk periode yang sama, ditambah dengan laporan khusus yang menjelaskan perubahan ekuitas kepemilikan pada neraca.

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut peraturan Bapepam Nomor: VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari :

Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu;  
Laporan Rugi Laba yang merupakan ringkasan aktivitas usaha

perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya; Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan; Laporan Arus Kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dengan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; Catatan Atas Laporan Keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

## 2.9 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sementara itu tujuan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam surat edaran ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002, adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang disusun untuk

tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 1999).

## **2.10 Pihak-Pihak Yang Memerlukan laporan Keuangan**

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 1999) :

### **1. Investor.**

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

#### 6. Pemerintah.

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

### 2.11 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu:
  - a. Ketepatan waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang siap digunakan para

pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan.

- b. Nilai prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan.
  - c. Umpan balik (*feedback value*), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasi ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.
2. *Reliable*, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. *Reliable* mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu:
- a. Dapat diperiksa (*verivability*), yaitu konsensus dalam pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen.
  - b. Kejujuran penyajian (*representation faithfulness*), yaitu adanya kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya.
  - c. Netralitas (*neutrality*), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai

husus informasi.

3. Daya Banding (*comparability*), informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya, dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.
4. Konsistensi (*consistency*), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode ([www.stekpi.ac.id](http://www.stekpi.ac.id)).

## 2.12 Pengungkapan

Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan sebagainya. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor. FASB mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2005) :

1. Statement keuangan (*financial statement*)
2. Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*)
3. Informasi pelengkap (*supplementary information*)
4. Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*)
5. Informasi lain (*other information*)

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan

keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

*Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.*

Evans (Suwardjono, 2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk *statement* keuangan formal.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan.

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang

sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono, 2005).

### **2.13 Tujuan Pengungkapan**

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005), diantaranya :

1. Tujuan Melindungi.

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup cangguh sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang

mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.

## 2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

## 3. Tujuan Kebutuhan Khusus.

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

## 2.14 Tinjauan Penelitian Terdahulu

### 2.14.1 Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan (Khomsiyah, 2003)

Tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan tingkat pengungkapan informasi. Selain itu penelitian ini juga menguji pengaruh struktur kepemilikan masyarakat,

keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan dewan komite audit, ukuran perusahaan, dan regulasi. Terdapat prediksi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Terdapat keterkaitan antara faktor regulasi dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip tanggung jawab mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasinya dengan lebih baik demi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Keberadaan komisaris independen dan komite audit mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* yaitu melindungi para *stakeholders* dari informasi yang menyesatkan, *fraud* dan *insider information* yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

Hasil penelitian :

1. Korelasi sederhana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi. Sesuai dengan hipotesis, implementasi *Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib.
2. Pengujian Hausman Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman, penelitian ini secara signifikan menunjukkan adanya hubungan antara indeks *Corporate Governance* (CGPI) dengan  $\epsilon^2t$ , dengan nilai t sebesar 3.291 ( $p=0.02$ ). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan simultan. Metode yang dapat memberikan hasil terbaik, konsisten dan efisien, adalah metode *two-stage least square* (2SLS).
3. Analisis regresi Hasil pengujian terhadap persamaan 1 menunjukkan bahwa indeks pengungkapan mempunyai hubungan positif dengan indeks *Corporate Governance*. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan dalam laporan tahunan, semakin tinggi tingkat implementasi *Corporate Governance*

perusahaan.

Regresi variabel-variabel eksogen menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Corporate Governance*, hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada tingkat regulasi yang tinggi, yaitu perbankan, menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik.

Hasil estimasi persamaan 2 juga mendukung hipotesis, menunjukkan bahwa indeks *Corporate Governance* mempunyai hubungan positif dengan indeks pengungkapan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Regresi variabel-variabel eksogen dalam persamaan 2 menunjukkan komposisi kepemilikan saham oleh masyarakat mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan.

Variabel lainnya, yaitu komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya hubungan dengan indeks pengungkapan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan. Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Ho dan Wong (2002) dalam Khomsiyah (2003), yang berhasil memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit mempunyai hubungan dengan luas

pengungkapan.

Dari uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

#### 2.14.1.1 Implementasi *Corporate Governance*

Dalam Khomsiyah (2003) dijelaskan Analisis regresi Hasil pengujian terhadap persamaan 1 menunjukkan bahwa indeks pengungkapan mempunyai hubungan positif dengan indeks *Corporate Governance*. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan dalam laporan tahunan, semakin tinggi tingkat implementasi *Corporate Governance* perusahaan. Hasil estimasi persamaan 2 juga mendukung hipotesis, menunjukkan bahwa indeks *Corporate Governance* mempunyai hubungan positif dengan indeks pengungkapan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Regresi variabel-variabel eksogen dalam persamaan 2 menunjukkan komposisi kepemilikan saham oleh masyarakat mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan. Maka dapat diturunkan Hipotesis :

H1 : Implementasi *Corporate Governance* secara signifikan mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

#### 2.14.1.2 Regulasi

Terdapat keterkaitan antara faktor regulasi dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari

masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasinya dengan lebih baik demi mematuhi peraturan- peraturan yang berlaku.

Penelitian Khomsiyah (2003) mengungkapkan Regresi variabel-variabel eksogen menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Corporate Governance*, hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada tingkat regulasi yang tinggi, yaitu perbankan, menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik. Maka dapat diturunkan Hipotesis sebagai berikut.

H2 : Regulasi berpengaruh secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.

#### 2.14.1.3 Struktur Kepemilikan, Keberadaan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan.

Variabel lainnya, yaitu komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya hubungan dengan indeks pengungkapan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan. Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Ho dan Wong (2002) dalam Khomsiyah (2003), yang berhasil memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit mempunyai hubungan dengan luas

pengungkapan.

- H3 : Struktur kepemilikan masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.
- H4 : Keberadaan dewan komisaris independen secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.
- H5 : Komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.
- H6 : Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.

#### 2.14.2 *Profitability and Corporate Governance Disclosure : An Indonesian Study* (Dwi Novi Kusumawati, 2006)

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan informasi.

*Most of the studies previously discussed support the positive relationship between profitability and disclosure level in annual report. Study conducted by Ahmed and Courtis (1999) which combined 12 profitability studies suggests that profitability, in general, having positive and significant relationship with voluntary disclosure level. However, this relationship is not found, or insignificant, in the disclosure study combined mandatory and voluntary disclosure.*

*The result of analysis, profitability is empirically affects GCG disclosure negatively. This result is consistent with the research*

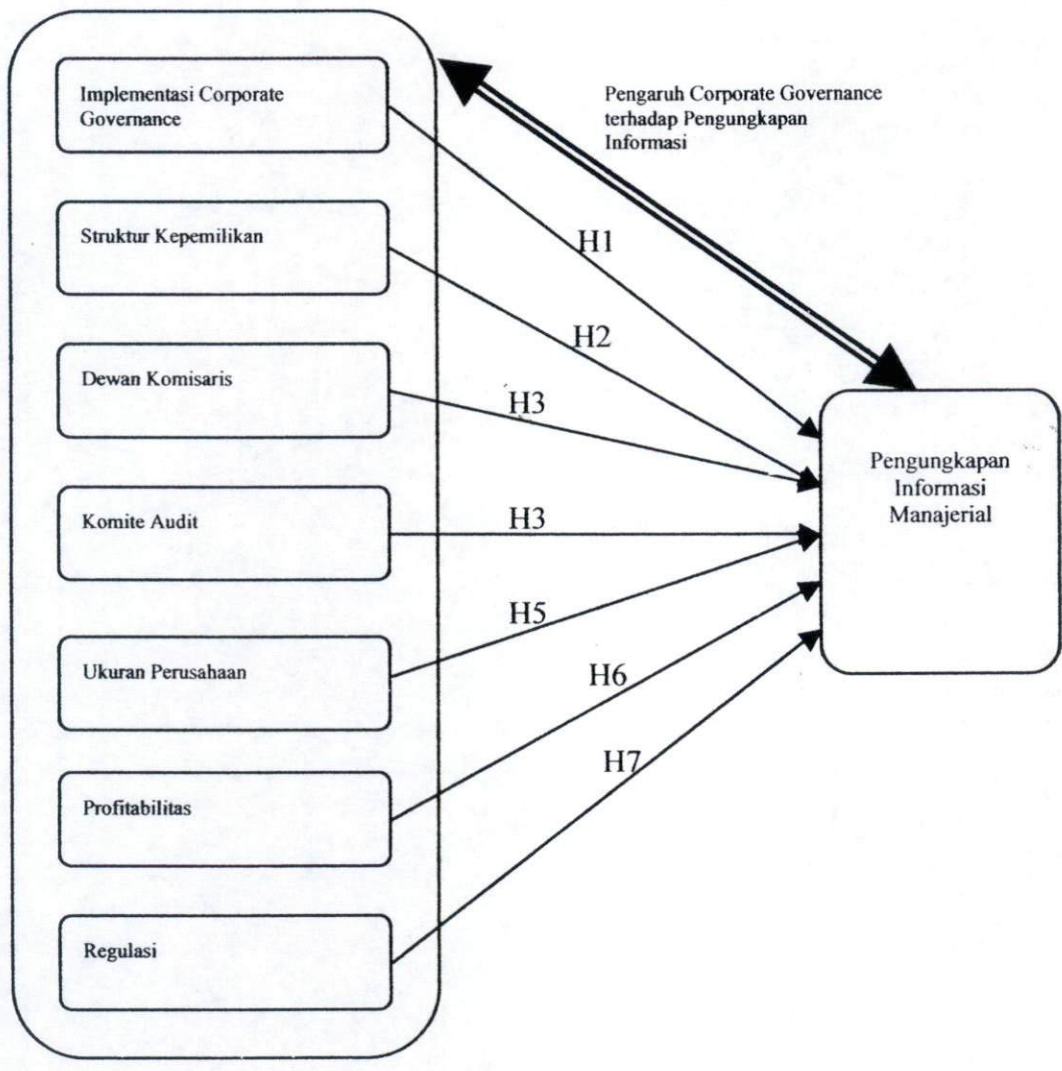
*conducted by Bujaki and McConomy (2002) state that firms facing a slow down in revenue will tend to disclose more about their corporate governance practices in annual report (Dwi Novi Kusumawati, 2006).*

Atas dasar penelitian ini, penulis akan mempertimbangkan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi.

H7 : Profitabilitas secara signifikan mempengaruhi pengungkapan informasi.

### 2.15 Model Penelitian

#### Variabel



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratoris; yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang saling berhubungan antara implementasi *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan data-data yang diperlukan meliputi: sampel dan data penelitian, spesifikasi variabel, analisa pengolahan data dan pengujian hipotesis.

#### 3.1 Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan- perusahaan yang terdapat di BEI tahun 2004-2008. Pemilihan sampel tersebut berkaitan dengan indeks *Corporate Governance*, indeks yang diperoleh dari IICG tahun 2004-2008. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dari populasi dengan kriteria tertentu:

1. *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) Data berupa laporan keuangan periode 2004-2008, yang telah dipublikasikan pada *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2005-2009, memuat *annual report* yang meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk tahun 2004-2008.
2. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* Data yang bersifat sekunder dari lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang berupa *Corporate Governance*

*Perception Index* (CGPI) dari tahun 2004-2008.

3. Website Jakarta Stock Exchange dan Indonesia Stock Exchange (IDX)

### 3.2 Spesifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*) (Khomsiyah, 2003).

1. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi yang dilihat dari persentase indeks pengungkapan pada masing-masing perusahaan. Indeks Pengungkapan disini merupakan butir laporan keuangan minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang diatur secara rinci dalam SAK. Menghitung variabel independen dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$IP = n/k$$

Keterangan : IP : Indeks Pengungkapan

n : Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

k : Jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi.

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam persamaan ini meliputi ;

- a. Indeks *Corporate Governance*.

Indeks ini adalah hasil pemeringkatan atas penerapan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh lembaga riset independen IICG

b. Size / ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dari neraca perusahaan.

c. Struktur Kepemilikan.

Menekankan pada proporsi kepemilikan masyarakat sebagai pihak luar dari perusahaan. Merupakan suatu bentuk mekanisme *Corporate Governance* yang bisa menyamakan kepentingan pemilik, pengelola atau manajer perusahaan maupun pihak eksternal. Proporsi kepemilikan diwakili oleh variabel *dummy*, nilai 1 untuk kepemilikan masyarakat >20% dan nilai 0 untuk kepemilikan masyarakat <20%.

d. Dewan komisaris.

Menekankan pada komposisi keberadaan komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris, artinya sekurang-kurangnya 20% anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang-orang luar. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* yaitu bernilai 1 jika perusahaan memiliki susunan komisaris independen sesuai dengan peraturan BEI, dan 0 jika tidak memiliki susunan dewan komisaris independen.

e. Komite audit.

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan

GCG. Komite audit terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota, diambil oleh dewan komisaris bukan dewan direksi agar obyektivitasnya terjaga. Menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 jika perusahaan memiliki susunan komite audit sesuai dengan peraturan BEI dan 0 jika perusahaan tidak memiliki susunan komite audit independen sesuai dengan peraturan BEI.

f. Regulasi.

Faktor regulasi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dengan 1 untuk perusahaan yang masuk dalam industri perbankan (begitu pula untuk BUMN).

g. Profitabilitas (Dwi Novi Kusumawati, 2006)

Profitabilitas dihitung dengan menggunakan ROE.

### 3.3 Analisis dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi. Indeks *Corporate Governance* yang tinggi mungkin disebabkan adanya penerapan transparansi yang baik oleh perusahaan, atau pengungkapan informasi yang tinggi merupakan keputusan manajemen yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (Khomsiyah, 2003).

Dalam penelitian ini juga akan menguji faktor baru yang mempengaruhi pengungkapan informasi, yaitu profitabilitas. Asumsi yang menjadi dasar adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan profit tinggi memiliki kecenderungan

untuk mengupayakan pengungkapan informasi yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengungkapan informasi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya juga akan dipertimbangkan dalam pengujian penelitian ini (Khomsiyah, 2003), yaitu struktur kepemilikan (Susanto, 1992; Na'lm dan Rahman, 2000; dan Marwata, 2001); komposisi dewan komisaris (Forker, 1992; Ho dan Wong, 2000; Sabeni, 2002); keberadaan komite audit (Forker, 1992; Ho dan Wong, 2000; Sabeni, 2002); ukuran perusahaan (Susanto, 1992; Lang dan Lundholm, 1993; Subiyantoro, 1997; Suropto, 1999; Gunawan, 2000, dan Fitriany, 2001; dan Marwata, 2001) dan juga regulasi.

Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$IP = \alpha_0 + \alpha_1 ICG + \alpha_2 SK + \alpha_3 DK + \alpha_4 KA + \alpha_5 SIZE + \alpha_6 PRFT + \alpha_7 REG + \epsilon_{2t}$$

Keterangan :

ICG : Indeks Corporate Governance

IP : Indeks Pengungkapan

REG : Regulasi

SK : Struktur Kepemilikan

DK : Komposisi Dewan Komisaris

KA : Keberadaan Komite Audit

SIZE : Ukuran Perusahaan

PRFT : Profitabilitas

Berdasarkan persamaan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen.
2. Uji Asumsi Klasik Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Asumsi klasik yang perlu diuji adalah normalitas multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

*a. Normalitas*

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan interpretasi *P-P plot*, untuk melihat apakah data variabel yang diuji berdistribusi normal dan layak untuk diuji statistik.

Interpretasi terhadap *P-P plot* didasarkan pada garis lurus yang melintang dari pojok kiri bawah ke kanan atas sehingga membentuk arah diagonal sebagai garis acuan normalitas. Data yang diwakili dengan titik-titik akan tersebar di sekitar garis acuan normalitas apabila distribusi datanya memang normal.

*b. Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas berhubungan secara linear. Uji multikolinearitas artinya ada hubungan kuat antara semua atau beberapa variabel penjelas dalam

model regresi yang digunakan. Menurut Gujaranti dalam Theresia (2005), adanya multikolinearitas yang kuat akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi.

Pengujian gejala multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas berhubungan secara linear. Ada beberapa faktor indikator untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas yaitu:

1. Koefisien Determinan ( $R^2$ ), tanda yang paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika  $R^2$  menjadi sangat tinggi tetapi tidak ada satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu jika dilakukan uji t.
2. Koefisien Kolerasi Parsial ( $R^2$ ), gejala multikolinearitas mungkin dapat diketahui bila melihat  $R^2$  yang tinggi namun koefisien korelasi parsialnya rendah. Pengujian gejala multikolinearitas dengan program SPSS dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factors*. Regresi terdeteksi multikolinearitas apabila nilai  $VIF > 5$  (Singgih Santoso, 2000).

#### c. Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan metode glesjer.

### 3. Analisis Regresi

Analisis regresi yaitu regresi variabel-variabel eksogen pada persamaan, untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Pengungkapan Informasi.

#### 3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan *Corporate Governance* (yang dilihat dari indeks *Corporate Governance*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi.

Pengujian secara parsial dipergunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel independen (x) hasil estimasi secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (y).

Langkah Pengujian:

a. Merumuskan Hipotesis Statistik

$H_0: \beta = 0$ ; variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta = 0$ ; variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Menetapkan *level of significant* sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$  dengan

*degree of freedom* (df) =  $n-k-1$  untuk mengetahui nilai t tabel pada daerah penerimaan dan penolakan  $H_0$ .

- c. Perhitungan nilai t dengan program SPSS.

## BAB IV

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisa Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi manajerial pada perusahaan yang disurvei IICG di BEI. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang ikut disurvei oleh IICG dari tahun 2004 – 2008. Banyaknya sample dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan.

**Tabel 4.1**  
**Keterangan Jumlah Perusahaan Sample**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Perusahaan yang diobservasi	50	Pemeringkatan IICG
2	Sampel gugur	2	Merger
3	Perusahaan Sampel	48	

Penelitian dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 50 perusahaan yang berpartisipasi dalam CGPI berdasarkan pemeringkatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang disajikan dalam lampiran. Sedangkan jumlah perusahaan yang memenuhi dalam penelitian ini berjumlah 48 perusahaan. Karena pada tahun 2004, PT. Dankos Laboratories Tbk telah melakukan merger dengan PT. Kalbe Farma Tbk, sehingga pada tahun yang bersangkutan kedua perusahaan tersebut tidak mengeluarkan laporan keuangan.

Menurut Sekaran (1992) jumlah atau ukuran sample 30 – 50 sudah cukup layak dan efektif untuk penelitian. Karena mempertimbangkan tujuan, efektifitas, biaya dan waktu metode *purposive sampling* diharapkan cukup valid dan akurat.

Sebelum data dianalisis dilakukan uji asumsi klasik. Data menggunakan signifikansi 5% dengan tingkat keyakinan 95%.

#### 4.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata – rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing – masing variabel selain variabel dummy.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean
IP	48	.43	1.00	.8438
ICG	48	77.58	90.65	82.9673
SIZE	48	371016722147.00	358438678000000.00	54908231605480.20 00
PRFT	48	.02	.59	.2104
Valid N (listwise)	48			

Sumber : Data diolah

Dari table 4.2 dapat dijelaskan statistic *dependent variable* dan *independent variable* selain *variable dummy*. Berdasarkan 48 perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata – rata indeks *Corporate Governance* adalah sebesar 82.97 dengan nilai maksimum 90.65 dan nilai minimum 77.58. Rata – rata indeks pengungkapan sebesar 84.4% dengan nilai maksimum sebesar 100% dan nilai minimum 43%. Rata – rata total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan nilai sebesar 54.908.231.605.480, dengan nilai maksimum 358.438.678.000.000 dan nilai minimum 371.016.722.147. Sedangkan rata – rata ROE yang diprosikan profitabilitas menunjukkan nilai sebesar 0.2104 dengan nilai maksimum 0.59 dan nilai minimum 0.02

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan apakah uji regresi yang telah dilakukan telah layak sebagai alat prediksi atau tidak. Agar hasil dari regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias, harus memenuhi beberapa uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

##### 4.1.2.1 Uji Normalitas

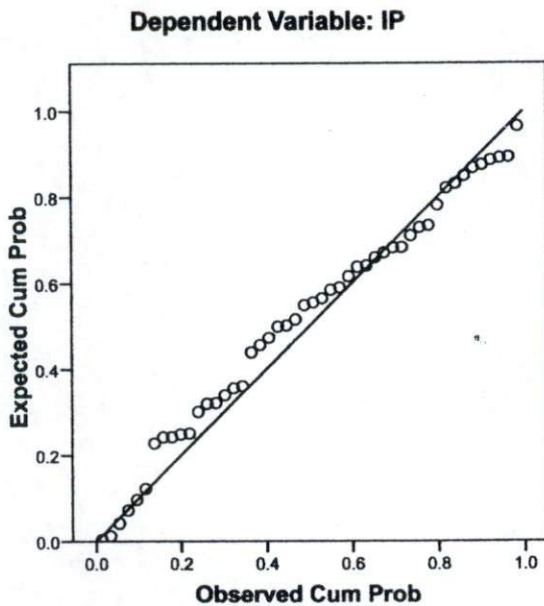
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sample yang diambil sebagai responden telah memenuhi criteria sebaran atau distribusi normal atau tidak.

Sujianto (2006) menjelaskan bahwa uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Santoso (2006) mengatakan bahwa uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik diterapkan.

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik P-P Plot of regression Standard. Deteksi normal atau tidaknya dapat dilakukan dengan melihat apakah titik – titik pada grafik tersebut menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah diagonal atau tidak. Jika titik – titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya, maka data normal dan lulus uji normalitas dan jika tidak data tidak normal atau tidak lulus uji normalitas. (Ghozali, 2001)

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Berdasarkan grafik 4.1 pada penelitian ini menunjukkan bahwa titik titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini lulus uji normalitas. Dan analisa berikutnya dapat dilanjutkan.

#### 4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik tidak ada korelasi antara variabel bebas (Singih Santoso, 2000). Uji ini dilihat dari nilai VIF nilai yang umumnya dipakai untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Regresi terdeteksi multikolinearitas apabila nilai  $VIF > 5$

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	ICG	0.671	1.491
2	SK	0.939	1.064
3	DK	0.832	1.201
4	KA	0.687	1.456
5	SIZE	0.478	2.091
6	PRFT	0.695	1.439
7	REG	0.715	1.399

**Sumber Data Diolah**

Dari table diatas terlihat bahwa nilai VIF masing – masing variable independent lebih dari 1 dan kurang dari 5 ( $1 < VIF < 5$ ), maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Jadi asumsi klasik tidak terdeteksi dan multikolinearitas terpenuhi.

#### 4.1.2.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan metode Durbin Watson adalah

- jika nilai D terletak antara 1,65 dan 2,35 maka tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi,
- jika nilai D terletak antara 1,21 dan 1,65 atau terletak antara 2,35 dan 2,79 maka tidak ada kesimpulan yang dapat diambil
- jika nilai D lebih kecil dari 1,21 atau nilai D lebih besar 2,79 maka terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	2.086

b. Dependent Variable: IP

Dari hasil pengujian Durbin-Watson (DW) diperoleh angka DW untuk *Indeks Pengungkapan* sebesar 2.086 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

#### 4.1.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2001: 105).

Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan metode glesjer. Berdasarkan proses estimasi data yang telah dilakukan maka ditemukan ringkasan hasil pengujian seperti terlihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Uji Heterokedastisitas**

Variabel Independent	t	Sig.
	B	Std. Error
ICG	1.726	0.092
SK	0.507	0.615
DK	-0.665	0.510
KA	0.395	0.695
SIZE	-1.871	0.065
PRFT	-1.562	0.064
REG	-1.536	0.132

a Dependent Variable: AbsUtIP

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikan yang diperoleh dari pengujian data berada diatas alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variable penelitian yang digunakan telah terbebas dari gejala heterokedasatisitas. Oleh sebab itu, pengujian hipotesis dapat segera dilaksanakan.

#### 4.1.3 Analisa regresi berganda

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi. Selain itu penelitian ini juga menguji kembali variable yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, yaitu struktur kepemilikan, keberadaan dewan komisaris independent, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, regulasi serta menguji 1 variabel baru yaitu profitabilitas .

Rangkuman hasil Analisa Regresi dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Rangkuman Hasil Analisa Regresi**

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-0.023	0.400		
ICG	0.010	0.005	1.783	0.082*
SK	0.137	0.032	4.229	0.000**
DK	0.133	0.042	3.164	0.003**
KA	0.046	0.115	0.399	0.692
SIZE	0.042	0.010	4.101	0.000**
PRFT	0.211	0.144	1.468	0.150
REG	0.118	0.034	3.515	0.001**

Ket : \* sign level 10%  
      \*\* sign level 5%

Sumber : Data diolah

Dari hasil rangkuman regresi di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut

$$IP = -0.023 - 0.010 ICG + 0.137SK + 0.133DK + 0.046KA + 0.042Size + 0.211PRFT + 0.118REG$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat nilai koefisien regresi untuk Indeks *Corporate Governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi memiliki nilai positif (+), ini menunjukkan adanya hubungan positif antara indeks *corporate governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi dengan indeks pengungkapan manajerial, dimana semakin naik/ tinggi struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi maka semakin naik/ tinggi indeks pengungkapan manajerial.

#### 4.1.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.1.4.1 Uji R dan Uji R<sup>2</sup>

Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua tau lebih variable independent terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai R mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

**Tabel 4.7**  
**Uji R dan Uji R<sup>2</sup>**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 <sup>a</sup>	.732	.685	.09393

a. Predictors: (Constant), REG, PRFT, DK, SK, ICG, KA, SIZE

b. Dependent Variable: IP

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.7 diatas diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0.855, hal ini menunjukkan bahwa secara bersama – sama terjadi hubungan yang sangat kuat antara indeks *corporate governance* , struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi dengan indeks pengungkapan manajerial.

Analisis determinasi dalam regresi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R < 1$ ),

dimana jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 1, maka hasil regresi semakin baik, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali: 2005, 45). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Dari tabel 4.7 diperoleh Nilai  $R^2$  sebesar 0.732 menunjukkan pengaruh yang diberikan oleh indeks *corporate governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi terhadap indek pengungkapan manajerial. Namun untuk variabel bebas yang lebih dari dua variabel, untuk uji koefisien determinasi menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0.683 artinya secara bersama – sama variabel indeks *corporate governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi mempengaruhi indeks pengungkapan manajerial sebesar 68.3%. Sedangkan sisanya 31.7% (100%-68.3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 4.1.4.2 Uji F

Uji signifikan simultan yang sering disebut dengan uji F ini dilakukan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh keseluruhan variabel dependen yang ada dalam model terhadap variabel independennya. Pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen dapat

diketahui dengan pengujian terhadap variasi nilai variabel yang terdapat dalam persamaan regresi. Hal ini dapat dari koefisien determinasi yang dihasilkan dari persamaan regresi yang dilakukan. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, artinya semakin mendekati 0 maka semakin kecil pula kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Sebaliknya semakin mendekati 1 maka semakin besar pula kemampuan seluruh variabel dalam model untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel independennya.

**Tabel 4.8**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.962	7	.137	15.583	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.353	40	.009		
	Total	1.315	47			

a. Predictors: (Constant), REG, PRFT, DK, SK, ICG, KA, SIZE

b. Dependent Variable: IP

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas besarnya diperoleh nilai Fhitung sebesar 15.583. Jika dibandingkan dengan tabel pada derajat bebas (df) =  $n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai  $f$  tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah sebesar 2.249, maka  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $15.583 > 2.249$ ) dengan signifikansi  $< 0.000$  ( $0.000 < 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel indeks *corporate governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan regulasi secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial

#### 4.1.4.3 Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap varaibel bebas secara parsial. Hasil analisa uji t dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Uji T**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
ICG	1.783	0.082*	signifikan
SK	4.229	0.000**	Signifikan
DK	3.164	0.003**	Signifikan
KA	.399	0.692	Tidak signifikan
SIZE	4.101	0.000**	Signifikan
PRFT	1.468	0.150	Tidak signifikan
REG	3.515	0.001**	Signifikan

Ket : \* sign level 10%

\*\* sign level 5%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 4.1.5 Pengaruh Implementasi *Corporate Governance* Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk *indeks corporate governance* sebesar 1.783. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas (df) =  $n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 90% (signifikansi 10% atau 0,1) adalah sebesar 1.684, maka thitung > ttabel ( $1.783 > 1.684$ ) dengan signifikansi < 0.10 ( $0.082 < 0.10$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *indeks corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk *struktur kepemilikan* sebesar 4.229. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas ( $df = n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n =$  jumlah sampel, dan  $k =$  jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $thitung > ttabel$  ( $4.229 > 2.021$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *struktur kepemilikan* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.7 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk *dewan komisaris* sebesar 3.164. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas ( $df = n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n =$  jumlah sampel, dan  $k =$  jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $thitung > ttabel$  ( $3.164 > 2.021$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.003 < 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *dewan komisaris* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk *komite audit* sebesar 0.399. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas ( $df$ ) =  $n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai  $t$  tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $thitung < ttabel$  ( $0.399 < 2.021$ ) dengan signifikansi  $> 0.05$  ( $0.692 > 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *komite audit tidak* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk ukuran perusahaan yang diprosikan melalui total aset perusahaan sebesar 4.101. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas ( $df$ ) =  $n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai  $t$  tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $thitung > ttabel$  ( $4.101 > 2.021$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *ukuran perusahaan* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.10 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk profitabilitas sebesar 1.468. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas  $(df) = n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.468 < 2.021$ ) dengan signifikansi  $> 0.05$  ( $0.150 > 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

#### **4.1.11 Pengaruh Regulasi Terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Manajerial**

Pada table 4.9, berdasarkan hasil analisa regresi, diperoleh nilai thitung untuk *regulasi* sebesar 3.515. Jika dibandingkan dengan ttabel pada derajat bebas  $(df) = n-k-1 = 48-7-1 = 40$ , dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.021, maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.515 > 2.021$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.001 < 0.05$ ). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel *regulasi* berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan manajerial.

**Tabel 4.10**  
**Tabel Kesimpulan Hipotesis**

No.	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Diterima	Implementasi Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
2	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Diterima	Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
3	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Diterima	Keberadaan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
4	Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Ditolak	Keberadaan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
5	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Diterima	Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
6	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Ditolak	Tingkat Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial
7	Pengaruh Regulasi Terhadap Pengungkapan Informasi Manajerial	Diterima	Regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi manajerial

## 4.2 Pembahasan

Dari hasil analisa data diatas, terbukti *corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hasil pengujian terhadap variabel dependen pengungkapan informasi dalam persamaan menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi implementasi

*corporate governance*, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003) dimana penelitiannya menemukan bahwa *corporate Governance* merupakan upaya untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi serta mendukung prinsip transparansi yang menjadi salah satu prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil analisa data, diperoleh struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam penerapan *Corporate Governance*, karena perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2003), yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih besar akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak dengan alasan memasakan sahamnya.

Variabel independen lainnya, komposisi dewan komisari berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dasarnya, karena keberadaan komisaris independen mendukung prinsip tanggungjawab dalam penerapan *corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003), komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi.

Hal ini mungkin disebabkan karena lemahnya praktek *corporate Governance* di Indonesia sehingga tidak ada keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk mengungkapkan tentang kondisi dan struktur *corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan independensi dewan komisaris. Meskipun *Jakarta Stock Exchange* telah mengatur jumlah keberadaan komisaris independen, namun dalam prakteknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen ini.

Komisi Audit tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya pengaruh terhadap pengungkapan informasi. Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya keberadaan komite audit mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *corporate governance*, yang menekan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan keuangan.

Namun hasil penelitian ini dapat diterima mengingat lemahnya praktek *corporate governance* di Indonesia. Hal ini disebabkan karena proses penunjukan anggota komite masih belum jelas dan terbuka, sehingga keindependensiannya masih patut diragukan. Pemilihan anggota yang masih memiliki hubungan kekerabatan marak terjadi. Integritas komite audit sendiri masih harus dipertanyakan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif pada aplikasi *corporate governance* dan merendahkan kualitas informasi yang diberikan perusahaan karena banyaknya kesempatan untuk memanipulasi dan mempermainkan data.

Berdasarkan hasil analisa data dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hal ini sesuai dengan teori dasarnya, dimana pengungkapan memerlukan cost yang tinggi, sehingga perusahaan besar dapat menyediakan pengungkapan yang lebih baik (Suwardjono, 2005). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tai, *et al* (1990) dan Wallace, *et, al* (1994)

Dari hasil analisa data dapat dilihat bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Profitabilitas tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan (Dwi Novi Kusumawati, 2006).

Meningkat budaya yang berkembang di Indonesia yang beranggapan bahwa praktek *Corporate Agovernance* hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*comformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja ([www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)), sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak menggunakan sebagian profitnya untuk memperbaiki kualitas informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Belkaoui dan Karpik (1989), yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*)

karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Variabel independen yang terakhir, yaitu regulasi. Dalam penelitian ini ditemukan regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi. Perusahaan – perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang tinggi (perbankan) akan cenderung untuk menerapkan *corporate governance* dengan lebih baik. Sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam penerapan *corporate governance*, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan itu berada (Khomsiyah, 2003)

Berbagai hal menjadi pertimbangan dalam penentuan standar untuk menentukan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi kendala dalam pengungkapan. Kendala pada umumnya timbul dari kaca mata perusahaan (Suwardjono, 2005)

Salah satu hal yang menentukan keluasaan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Tujuan perlindungan atau protektif biasanya menuntut pengungkapan yang lebih dan lebih rinci. Namun bila pengungkapan itu terlalu banyak maka akan memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah, sehingga beberapa pihak justru berpendapat berbeda.

Dalam banyak hal, kelebihan informasi (*information overload*) harus menjadi pertimbangan. Kelebihan informasi adalah penyediaan informasi yang melebihi kemampuan pemakai untuk mencernanya secara efektif. Hal ini berlawanan dengan konsep yang menyatakan bahwa makin banyak informasi

makin baik. Informasi yang terlalu melimpah akan mengungkapkan detail yang tidak begitu penting. Hal ini justru akan menutup informasi yang signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan laporan keuangan sulit diinterpretasikan.

Dampak negatif lainnya dari pengungkapan adalah pada kompetisi yang dinamis dalam pasar. Bagaimanapun juga, informasi tertentu sangat berharga baik perusahaan dalam kondisi persaingan. Pengungkapan informasi meluas dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi privatnya.

Oleh karena itu sebaiknya perusahaan lebih mengutamakan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM, karena dalam pengungkapan wajib ini investor dapat menginterpretasikan angka – angka dalam laporan keuangan benar dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaruh implementasi Corporate Governance terhadap pengungkapan informasi.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.082, p-value lebih kecil dari  $\alpha$  10% ( $0.082 < 0.1$ ). Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan semakin tinggi implementasi Corporate Governance, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan (Khomsiyah, 2003).

2. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan informasi.

Analisis regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar 4.229 dan p-value sebesar 0.000, p-value lebih besar dari  $\alpha$  5% ( $0.000 < 0.05$ ). Dalam banyak kasus sering dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (immune) terhadap pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Hal ini juga disebabkan praktik KKN, manipulasi data dan penginformasian data yang tidak benar merupakan hal yang lumrah dan dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak salah, sehingga mengakibatkan lemahnya praktik pengungkapan dalam suatu perusahaan.

3. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan informasi.

Komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan dalam hasil penelitian p-value lebih besar dari  $\alpha 5\%$  ( $0.003 > 0.05$ ). Hal ini mengungkapkan independensi seorang komisaris dalam sebuah perusahaan akan menguatkan aplikasi Corporate Governance dan akan membawa imbas pada pengungkapan informasi yang menjadi bagian dalam prinsip transparansi.

4. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan informasi.

Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan nilai p-value lebih besar dari  $\alpha 5\%$  ( $0.692 > 0.05$ ). Dalam praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih anggota dari komite audit, sehingga walaupun komite audit ini telah ada namun tidak diketahui bagaimana penunjukannya. Hal ini akan membawa dampak negatif dalam keterbukaan dan penyajian yang jujur dari pengungkapan informasi.

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi.

Analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.000, p-value lebih besar dari  $\alpha 5\%$  ( $0.000 > 0.05$ ). Hal ini dikarenakan perusahaan beranggapan bahwa GCG sudah merupakan hal yang penting dalam kegiatan perusahaan untuk terus sustainable. Sehingga penerapannya semakin tahun semakin meningkat.

6. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan informasi.

Analisis regresi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat dari nilai statistik dimana p-value lebih besar dari  $\alpha 5\%$  ( $0.150 > 0.05$ ). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Reni Retno Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

7. Pengaruh regulasi terhadap pengungkapan informasi.

Regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.001. Hal ini sejalan dengan teori dasarnya dimana perusahaan dengan peraturan tinggi akan mengungkapkan informasi dengan lebih baik sebagai wujud rasa tanggung jawab pada stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan berada.

## 5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti pada satu jenis usaha dengan periode sampel yang lebih lama, sehingga diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili praktik Corporate Governance dengan lebih baik.
2. Agar penelitian selanjutnya menggunakan data primer sehingga dapat melihat secara detail tinggi rendahnya nilai indeks pada setiap kriteria penilaian Corporate Governance.

3. Analisis yang lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang membentuk indeks Corporate Governance dan dikaji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkap informasi.

### 5.3 Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat nilai indeks Corporate Governance sehingga tidak diketahui secara detail tinggi rendahnya nilai indeks pada setiap kriteria penilaian indeks Corporate Governance.

Disamping itu penelitian ini menggunakan data saat ini untuk data Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Regulasi, bukan menggunakan data sesuai dengan tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R.R. "Pengungkapan Informasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Laporan Keuangan Tahunan (*Study* Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Bachtaruddin, T. 2003. *Struktur Teori Akuntansi Keuangan*. Diambil dari <http://www.zahiraccounting.com/id/modules/zahirtutorial/item.php?itemid=10>.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2005. *Studi Tentang Analisa Laporan Keuangan Secara Elektronik*. Diambil dari [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/kajian\\_pm/studi\\_2005/Analisis\\_LK.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi_2005/Analisis_LK.pdf).
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). 2002. "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). *The Essence of Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*". Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan *Sinergy Communication*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). 2002. "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jilid II "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)". Diambil dari [http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI\\_Booklet\\_II.pdf](http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI_Booklet_II.pdf).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khomsiyah. 2003. "Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Kusumawati, D.N. "*Profitability and Corporate Governance Disclosure: An Indonesian Study*". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Maksum, Azhar. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Diambil dari [http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb\\_2005\\_azhar\\_maksum.pdf](http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf).
- Santoso, Singgih. 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik secara Profesional Versi 7.5*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

- Suprayitno, G. 2005. *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis*. Jakarta: IICG.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFÉ.
- Theresia, D. "Hubungan Antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Jakarta)". *Kumpulan Artikel SNA VIII Solo*. September. hal. 238-247.
- Tjager, Nyoman, dkk.. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- [http://www.stekpi.ac.id/skin/download3/Bab1\\_2.pdf](http://www.stekpi.ac.id/skin/download3/Bab1_2.pdf)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan\\_Etika\\_Kompartemen\\_Akuntan\\_Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_Etika_Kompartemen_Akuntan_Publik)
- <http://www.idx.co.id>

## Lampiran 1

## DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2004

No	Nama Perusahaan	Skor CGPI
1	PT Astra International Tbk	85.87
2	PT Bank central Asia Tbk	85.14
3	PT Bank Niaga Tbk	84.23
4	PT Dankos Laboratories Tbk	83.72
5	PT Bank Permata Tbk	83.33
6	PT BFI Finance Indonesia	82.55
7	PT Astra Argo Lestari	82.31
8	PT Bank Bumiputera Indonesia	81.29
9	PT Astra Graphia Tbk	80.52
10	PT Kalbe Farma Tbk	80.24

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2005

No	Nama Perusahaan	Skor CGPI
1	PT Astra International Tbk	85.86
2	PT Bank central Asia Tbk	85.14
3	PT Bank Niaga Tbk	84.23
4	PT Dankos Laboratories Tbk	83.72
5	PT Bank Permata Tbk	83.33
6	PT BFI Finance Indonesia	82.55
7	PT Astra Argo Lestari	82.32
8	PT Bank Bumiputera Indonesia	81.29
9	PT Astra Graphia Tbk	80.52
10	PT Kalbe Farma Tbk	80.24

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2006

No	Nama Perusahaan	Skor CGPI
1	PT Bank Niaga Tbk	89.27
2	PT Medco International Tbk	87.40
3	PT Bank Mandiri Tbk	83.66
4	PT Astra International Tbk	83.01
5	PT Aneka Tambang Tbk	81.92
6	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	81.30
7	PT Bank Negara Indonesia Tbk	79.39
8	PT Kalbe Farma Tbk	78.70
9	PT Astra Graphia Tbk	78.33
10	PT Apexindo Pratama Tbk	77.58

## Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2007

No	Nama Perusahaan	Skor CGPI
1	PT Bank Mandiri Tbk	88.66
2	PT Bank Niaga Tbk	87.90
3	PT Aneka Tambang Tbk	82.07
4	PT Adhi Karya Tbk	81.79
5	PT United Tractors Tbk	81.53
6	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	80.87
7	PT Astra Graphia Tbk	80.30
8	PT Kalbe Farma Tbk	79.70
9	PT Bank Negara Indonesia Tbk	79.46
10	PT Bank Permata Tbk	78.85

## Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2008

No	Nama Perusahaan	Skor CGPI
1	PT Bank Mandiri Tbk	90.65
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	88.67
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk	88.37
4	PT Aneka Tambang Tbk	85.87
5	PT United Tractors Tbk	85.44
6	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	82.27
7	PT Elnusa Tbk	81.74
8	PT Bank Negara Indonesia Tbk	81.63
9	PT Jasa Marga Tbk	81.62
10	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	81.59

Lampiran 2  
Regression

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IP	48	.43	1.00	.8438	.16729
ICG	48	77.58	90.65	82.9673	3.13870
SIZE	48	371016722147.00	368438678000000	54908231605480	85981469465077.80
PRFT	48	.02	.59	2104	11433
Valid N (listwise)	48				

Correlations

Pearson Correlation	IP	ICG	SK	DK	KA	SIZE	PRFT	REG
IP	1.000	.163	.365	.473	-.014	.632	.145	.496
ICG	.163	1.000	-.079	.145	.042	.555	-.051	.190
SK	.365	-.079	1.000	.034	-.084	.021	.134	-.126
DK	.473	.145	.034	1.000	-.060	.384	-.025	.064
KA	-.014	.042	-.084	-.060	1.000	.009	-.489	.197
SIZE	.632	.555	.021	.384	.009	1.000	-.093	.415
PRFT	.145	-.051	.134	-.025	-.489	-.093	1.000	.045
REG	.496	.190	-.126	.064	.197	.415	.045	1.000
Sig. (1-tailed)								
IP	.134	.134	.005	.000	.462	.000	.162	.000
ICG	.005	.296	.296	.163	.388	.000	.366	.098
SK	.000	.163	.409	.409	.285	.442	.182	.197
DK	.462	.388	.285	.342	.342	.004	.434	.332
KA	.000	.000	.442	.004	.475	.475	.000	.090
SIZE	.162	.366	.182	.434	.000	.265	.265	.002
PRFT	.000	.098	.197	.332	.090	.002	.360	.390
REG								
N	48	48	48	48	48	48	48	48
IP	48	48	48	48	48	48	48	48
ICG	48	48	48	48	48	48	48	48
SK	48	48	48	48	48	48	48	48
DK	48	48	48	48	48	48	48	48
KA	48	48	48	48	48	48	48	48
SIZE	48	48	48	48	48	48	48	48
PRFT	48	48	48	48	48	48	48	48
REG	48	48	48	48	48	48	48	48

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	REG, DK, PRFT, ICG, SK, SIZE, KA, SIZE		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IP

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.855 <sup>a</sup>	.732	.685	.09393	.732	15.583	7	40	.000	2.086

a. Predictors: (Constant), REG, PRFT, DK, SK, ICG, KA, SIZE

b. Dependent Variable: IP

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.962	7	.137	15.583	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.353	40	.009		
	Total	1.315	47			

a. Predictors: (Constant), REG, PRFT, DK, SK, ICG, KA, SIZE

b. Dependent Variable: IP

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics		
							Lower Bound	Upper Bound	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.023	.400										
	ICG	.010	.005	.178	-0.566	.555	-.831	.786	.163	-.271	-.146	.671	1.491
	SK	.137	.032	.357	1.783	.082	-.020	.001	.365	.556	.346	.939	1.064
	DK	.133	.042	.284	4.229	.000	.071	.202	.473	.447	.259	.832	1.201
	KA	.046	.115	.039	3.164	.003	.048	.218	-.014	.063	.033	.687	1.456
	SIZE	.042	.010	.486	3.99	.692	-.186	.277	.632	.544	.336	.478	2.091
	PRFT	.211	.144	.144	4.101	.000	.021	.063	.632	.226	.120	.695	1.439
	REG	.118	.034	.341	1.468	.150	-.079	.502	.145	.486	.288	.715	1.399

a. Dependent Variable: IP

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model	REG	PRFT	DK	SK	ICG	KA	SIZE
1	REG	1.000					
	PRFT	-.252	1.000				
	DK	.103	-.002	1.000			
	SK	.173	-.152	.002	1.000		
	ICG	.100	-.060	.092	.123	1.000	
	KA	-.297	.525	.034	-.039	-.071	1.000
	SIZE	-.436	.189	-.370	-.144	-.535	.157
	<b>Covariances</b>						
	REG	.001	-.001	.000	.000	1.79E+005	-.001
	PRFT	-.001	.021	-.001	-.001	-.4.6E-005	.009
	DK	.000	-.1.4E-005	.002	-.001	2.08E-005	.000
	SK	.000	-.1.4E-005	.002	.001	2.13E-005	.000
	ICG	1.79E-005	3.03E-006	2.08E-005	2.13E-005	2.84E-005	-.4.4E-005
	KA	-.001	-.009	.000	.000	-.4.4E-005	.013
	SIZE	.000	.000	.000	-.4.8E-005	-.2.9E-005	.000

a. Dependent Variable: IP

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions								
				(Constant)	ICG	SK	DK	KA	SIZE	PRFT	REG	
1	1	7.113	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.356	4.472	.00	.00	.17	.00	.00	.00	.00	.01	.51
	3	.215	5.749	.00	.00	.00	.07	.00	.00	.00	.53	.03
	4	.189	6.130	.00	.00	.76	.05	.00	.00	.00	.09	.19
	5	.113	7.925	.00	.00	.04	.70	.02	.00	.00	.01	.03
	6	.011	25.299	.01	.01	.00	.07	.83	.03	.03	.24	.01
	7	.001	73.431	.30	.05	.01	.10	.14	.84	.11	.11	.23
	8	.001	109.480	.70	.94	.02	.00	.01	.13	.00	.00	.00

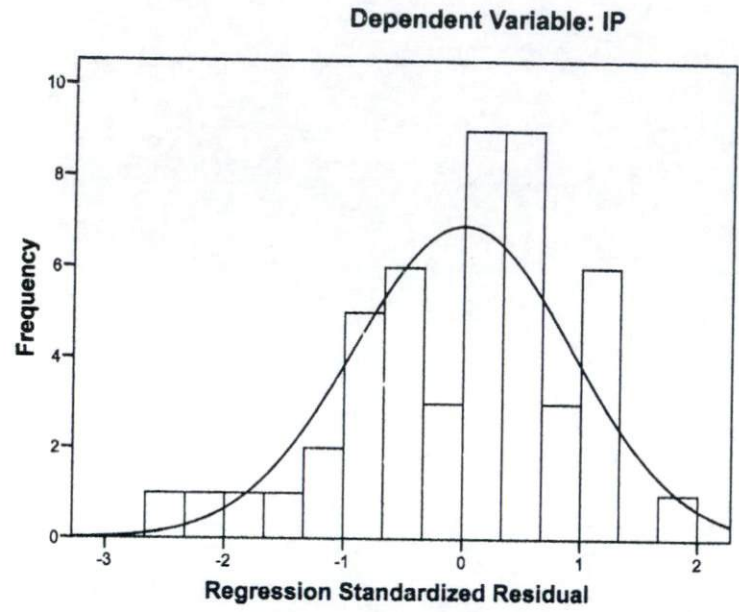
a. Dependent Variable: IP

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.4647	1.0657	.8437	.14310	48
Std. Predicted Value	-2.649	1.551	.000	1.000	48
Standard Error of Predicted Value	.026	.094	.037	.010	48
Adjusted Predicted Value	.4809	1.0781	.8445	.14392	47
Residual	-.24894	.16929	.00000	.08665	48
Std. Residual	-2.650	1.802	.000	.923	48
Stud. Residual	-2.952	1.947	-.005	1.022	47
Deleted Residual	-.30881	.19751	-.00112	.10536	47
Stud. Deleted Residual	-3.296	2.020	-.017	1.062	47
Mahal. Distance	2.738	46.021	6.854	6.260	48
Cook's Distance	.000	.262	.026	.048	47
Centered Leverage Value	.058	.979	.146	.133	48

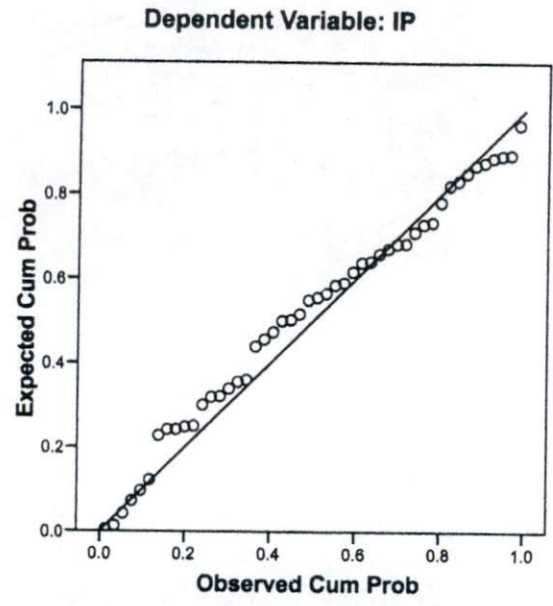
a. Dependent Variable: IP

Histogram



Mean = 4.43E-15  
Std. Dev. = 0.923  
N = 48

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



# Uji Heterokedastisitas Metode Glesjer

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.254	.234		-1.084	.285
	ICG	.005	.003	.245	1.726	.092
	SK	.009	.019	.068	.507	.615
	DK	-.015	.022	-.086	-.665	.510
	KA	.025	.063	.059	.395	.695
	SIZE	-3.3E-016	.000	-.464	-1.871	.065
	PRFT	-.214	.083	-.401	-1.562	.064
	REG	-.027	.018	-.217	-1.536	.132

a. Dependent Variable: AbsUtIP

## DATA PENGUJIAN STATISTIK

Th	Nama	Indeks	Ukuran Perusahaan	Struktur kepemilikan	Dewan Komisaris	Komite Audit	Regulasi	Profitabilitas / ROE	IP
2004	PT Astra International Tbk	85.87	39145053000000	1	1	1	0	0.33	0.86
	PT Bank central Asia Tbk	85.14	140203775000000	1	1	1	1	0.19	1.00
	PT Bank Niaga Tbk	84.23	30798312000000	0	1	1	1	0.27	0.86
	PT Dankos Laboratories Tbk	83.72	1050886839298	0	0	0	0	0.34	0.71
	PT Bank Permata Tbk	83.33	31756642000000	0	1	1	1	0.27	0.86
	PT BFI Finance Indonesia	82.55	1068272649162	0	0	0	0	0.02	0.43
	PT Astra Argo Lestari	82.31	3382821000000	1	1	1	0	0.39	0.86
	PT Bank Bumiputera Indonesia	81.29	3802123294000	1	1	1	1	0.12	1.00
	PT Astra Graphia Tbk	80.52	371016722147	0	0	0	0	0.11	0.43
	PT Kalbe Farma Tbk	80.24	3016864058832	1	1	1	0	0.31	0.86
2005	PT Astra Internasional Tbk	85.86	46985862000000	1	1	1	0	0.27	0.86
	PT Bank Central Asia Tbk	85.14	150180752000000	1	1	1	1	0.32	1.00
	PT Bank Niaga Tbk	84.23	41579861000000	0	1	1	1	0.18	0.86
	PT Bank Permata Tbk	83.33	34782459000000	0	1	1	1	0.11	0.86
	PT BFI Finance Indonesia Tbk	82.55	1199023266450	0	0	0	0	0.10	0.71
	PT Astra Argo Lestari Tbk	82.32	3191715000000	1	1	1	0	0.30	0.86
	PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk	81.29	4317051947000	1	1	1	1	0.24	1.00
	PT Astra Graphia Tbk	80.52	518803623322	1	1	1	0	0.13	0.86
	PT Kalbe Farma Tbk	80.24	4633398659211	1	1	1	0	0.27	0.86
	2006	PT Bank Niaga Tbk	89.27	46544346000000	0	0	0	1	0.14
PT Medco International Tbk		87.40	18415828230000	1	1	1	0	0.07	0.86
PT Bank Mandiri Tbk		83.66	267517192000000	1	1	1	1	0.09	1.00
PT Astra International Tbk		83.01	57929290000000	1	1	1	0	0.17	0.86
PT Aneka Tambang Tbk		81.92	7290905515000	1	1	1	1	0.36	1.00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		81.30	75135745000000	1	1	1	1	0.39	1.00
PT Bank Negara Indonesia Tbk		79.39	169415573000000	1	1	1	1	0.13	1.00
PT Kalbe Farma Tbk		78.70	4624619204478	1	1	1	0	0.23	0.86
PT Astra Graphia Tbk		78.33	584838895959	0	0	0	0	0.19	0.43
PT Apexindo Pratama Tbk		77.58	891517643000	0	1	1	0	0.20	0.71
2007	PT Bank Mandiri Tbk	88.66	319085590000000	1	1	1	1	0.15	1.00
	PT Bank Niaga Tbk	87.90	54885576000000	0	1	1	1	0.15	0.86
	PT Aneka Tambang Tbk	82.07	12037916922000	1	1	0	1	0.59	0.86

	PT United Tractors Tbk	81.55	13002619000000	1	1	1	0	0.26	0.86
	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	80.87	3928071000000	1	0	1	1	0.27	0.86
	PT Astra Graphia Tbk	80.30	624557293214	1	1	1	0	0.23	0.86
	PT Kalbe Farma Tbk	79.70	5138212506980	1	1	1	0	0.21	0.86
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	79.46	183341611000000	1	1	1	1	0.05	1.00
	PT Bank Permata Tbk	78.85	39298423000000	0	1	1	1	0.13	0.86
2008	PT Bank Mandiri Tbk	90.65	358438678000000	1	1	1	1	0.17	1.00
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	88.67	91256250000000	1	1	1	1	0.31	1.00
	PT Bank CIMB Niaga Tbk	88.37	103197574000000	0	1	1	1	0.07	0.86
	PT Aneka Tambang Tbk	85.87	10245040780000	1	1	1	1	0.17	1.00
	PT United Tractors Tbk	85.44	22847721000000	1	1	1	0	0.24	0.86
	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	82.27	6106828000000	1	0	1	1	0.43	0.86
	PT Elnusa Tbk	81.74	3317816000000	1	1	1	0	0.08	0.86
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	81.63	201741069000000	1	1	1	1	0.08	1.00
	PT Jasa Marga Tbk	81.62	14642760013000	1	0	1	1	0.11	0.86
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	81.59	2124255000000	0	0	1	1	0.16	0.71